

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA
YANG MELAKUKAN MOGOK DI PERUSAHAAN**



Oleh:

H A M I D H A

NIM: 2120216320031

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2025**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA
YANG MELAKUKAN MOGOK DI PERUSAHAAN**



Oleh:

H A M I D H A

NIM: 2120216320031

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA
YANG MELAKUKAN MOGOK DI PERUSAHAAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh:

**H A M I D H A
NIM: 2120216320031**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2025**

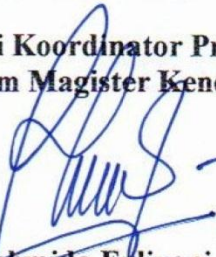
**Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal....**

Pembimbing



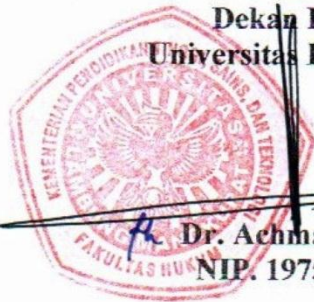
**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

**Menyetujui Koordinator Program Studi
Program Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAMIDHA

NIM : 2120216320031

Program Studi : Magister Hukum Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2025

Yang membuat pernyataan




HAMIDHA
NIM. 2120216320031

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG MELAKUKAN MOGOK DI PERUSAHAAN

Oleh :

Hamidha¹, Saprudin²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman.

RINGKASAN

Dalam hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, seringkali terjadi ketidakseimbangan kekuatan yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja. Salah satu bentuk ekspresi pekerja dalam memperjuangkan haknya adalah melalui aksi mogok kerja. Mogok kerja merupakan hak dasar yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional sebagai wujud kebebasan berserikat dan berunding. Namun, dalam praktiknya, mogok kerja masih sering dihadapkan pada hambatan struktural, birokratis, bahkan represif dari pengusaha maupun aparat negara. Banyak kasus mogok kerja yang berujung pada tindakan intimidatif, pemutusan hubungan kerja sepihak, dan kriminalisasi terhadap pekerja. Di sisi lain, pengusaha merasa terganggu oleh mogok kerja dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap kontinuitas produksi dan stabilitas perusahaan. Ketegangan ini mengindikasikan adanya permasalahan hukum dalam hal perlindungan terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja. Berdasarkan realitas tersebut, perlindungan hukum terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja perlu ditelaah secara komprehensif untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap terlindungi dalam sistem hukum ketenagakerjaan yang adil dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja di perusahaan, baik dari aspek preventif maupun represif. Secara khusus, penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok, yakni mengenai hak dan kewajiban para pihak akibat dilakukannya mogok kerja di suatu perusahaan serta mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang melakukan mogok. Tujuan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam aspek perlindungan hak-hak dasar pekerja. Tujuan praktisnya adalah memberikan sumbangsih dalam bentuk rekomendasi kebijakan kepada pembuat kebijakan dan pelaku hubungan industrial agar perlindungan terhadap hak mogok kerja dapat diwujudkan secara lebih efektif. Dengan mengkaji aspek hukum dari mogok kerja secara holistik, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan pemahaman yang selama ini masih timpang antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi serikat pekerja, pengusaha, serta penegak hukum dalam memahami batasan dan

¹NIM. 2120216320031

²Pembimbing Utama.

jaminan hukum dalam aksi mogok kerja yang sah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-232/MEN/2003, serta regulasi terkait lainnya yang mengatur mogok kerja dan perlindungan pekerja. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin hukum terkait teori perlindungan hukum dan teori keadilan sebagai landasan analitis. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis beberapa putusan pengadilan maupun kasus nyata yang relevan dalam konteks mogok kerja. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan menteri, bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif-induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak mogok kerja merupakan bagian integral dari hak kebebasan berserikat dan berunding yang dijamin oleh Konstitusi, Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta standar internasional seperti Konvensi ILO No. 87 dan No. 98. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak ini masih mengalami banyak tantangan dan pelanggaran. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mogok kerja dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk: perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan prosedur mogok kerja secara legal, termasuk kewajiban pemberitahuan, syarat sah mogok kerja, dan larangan penghalangan mogok. Regulasi seperti Keputusan Menteri Nomor KEP-232/MEN/2003 mempertegas akibat hukum mogok kerja yang sah maupun tidak sah. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan dalam bentuk mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial. Jika terjadi pelanggaran oleh pengusaha terhadap hak mogok pekerja, seperti pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau penghalangan terhadap kegiatan serikat pekerja, maka tersedia sanksi administratif dan pidana. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum ini belum maksimal karena lemahnya pengawasan, keberpihakan aparat, dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengusaha. Oleh sebab itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan institusi ketenagakerjaan, peran aktif negara dalam menjamin pelaksanaan hak mogok kerja secara adil, serta pendidikan hukum kepada pekerja dan pengusaha. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak mogok kerja tidak hanya menjadi norma ideal, tetapi benar-benar menjadi kenyataan yang menjamin keadilan industrial di Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG MELAKUKAN MOGOK DI PERUSAHAAN

Oleh :

Hamidha³, Saprudin⁴

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Pekerja, Mogok di Perusahaan

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja yang Melakukan Mogok di Perusahaan, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja dalam menjalankan hak mogok kerja, baik secara normatif maupun praktiknya di lapangan. Kegunaan dari penelitian ini secara akademis adalah memperkaya diskursus hukum ketenagakerjaan, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi dalam perumusan kebijakan dan implementasi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Permasalahan pertama yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja sebagai akibat dari dilakukannya mogok kerja. Temuan menunjukkan bahwa pekerja memiliki hak hukum untuk melakukan mogok sebagai bagian dari kebebasan berserikat dan berunding, dengan catatan memenuhi syarat prosedural yang ditetapkan dalam regulasi. Pengusaha di sisi lain, berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif atau balasan terhadap pekerja yang mogok secara sah, dan tetap harus menghormati hak-hak normatif pekerja selama mogok berlangsung.

Permasalahan kedua menyangkut bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja. Penelitian menemukan adanya dua bentuk perlindungan, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif berupa pengaturan hukum yang jelas terkait prosedur mogok kerja, sedangkan perlindungan represif berupa sanksi terhadap pengusaha yang melanggar. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih lemah karena kurangnya pengawasan dan keberpihakan aparat terhadap pekerja. Diperlukan penguatan lembaga pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan terhadap serikat pekerja.

³NIM. 2120216320031

⁴Pembimbing Utama.

**LEGAL PROTECTION OF WORKERS' RIGHTS TO STRIKE
IN COMPANIES**

By:

Hamidha⁵, Saprudin⁶

Master of Notarial Law, Lambung Mangkurat University, 102 pages.

ABSTRACT

Keywords: Legal Protection, Workers' Rights, Strike in the Company.

This study, entitled Legal Protection of Workers' Rights to Strike in Companies, aims to analyze and examine the forms of legal protection available to workers exercising their right to strike, both normatively and in practice. The significance of this study lies in its academic contribution to labor law discourse and its practical relevance in providing policy and legal implementation recommendations. The research method used is normative juridical, with statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through literature studies and analyzed qualitatively.

The first issue discussed in this study concerns the rights and obligations of both parties in an employment relationship as a consequence of strike action. The findings show that workers have a legal right to strike as part of their freedom of association and collective bargaining, provided that they fulfill the procedural requirements stipulated in the regulations. Employers, on the other hand, are obliged not to carry out discriminatory or retaliatory actions against workers who strike legally, and must continue to respect the workers' normative rights during the strike.

The second issue examines the forms of legal protection for striking workers. The study identifies two types of protection: preventive and repressive. Preventive protection consists of clear legal provisions governing the strike procedure, while repressive protection involves legal sanctions against employers who violate the law. However, the effectiveness of such protection remains weak due to lack of enforcement and partiality against workers. Thus, there is a need to strengthen labor inspection institutions and protect trade unions to ensure fair industrial relations.

⁵NIM. 2120216320031

⁶Pembimbing Utama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja yang Melakukan Mogok di Perusahaan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Tesis ini lahir dari keprihatinan penulis terhadap kenyataan di dunia kerja, di mana hak pekerja untuk melakukan mogok sering kali dipandang sebagai pelanggaran, bukan sebagai bentuk perjuangan yang sah dan dijamin oleh hukum. Padahal, mogok kerja merupakan bagian dari hak asasi pekerja yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional. Dalam praktiknya, banyak pekerja menghadapi tindakan represif, pemutusan hubungan kerja sepihak, hingga kriminalisasi hanya karena menuntut hak melalui mogok kerja. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam perlindungan hukum terhadap pekerja yang seharusnya menjadi subjek utama dalam hubungan industrial.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan, baik secara akademis maupun teknis. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan tugas akademik ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

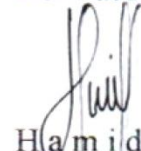
1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Kenotariatan,

3. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis di dalam penulisan Tesis.
4. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Rekan-rekan Mahasiswa angkatan 2021 Program Magister Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan ke depan. Penulis berharap, tesis ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan, serta menjadi referensi akademik yang berguna bagi praktisi, pembuat kebijakan, maupun kalangan pekerja dan serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak normatif mereka secara legal dan terukur.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik dan masyarakat luas serta mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Hormat Penulis



Hamidha
NIM. 2120216320031

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	38
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	45
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK AKIBAT DILAKUKANNYA MOGOK KERJA DI SUATU PERUSAHAAN.....	47
A. Hak Pekerja dan Serikat Pekerja dalam Mogok Kerja..	47
B. Kewajiban Pengusaha dan Konsekuensi Hukum terhadap Perusahaan.....	61
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MELAKUKAN MOGOK.....	76
A. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Pekerja yang Melakukan Mogok.....	76
B. Perlindungan Hukum Represif dalalam Mogok Kerja....	90

BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA